

MODUL PEMBELAJARAN GEOGRAFI KELAS XII

BAB I

WILAYAH DAN PEWILAYAHAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL



Oleh : Andi Hidayat

MAN 1 GUNUNGKIDUL

Jalan Sunan Ampel 68 Trimulyo II Kepek Wonosari Gunungkidul

Daerah Istimewa Yogyakarta 55813

2019

WILAYAH DAN PEWILAYAHAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

A. WILAYAH (Region)

Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.



1. Konsep-konsep wilayah antara lain :

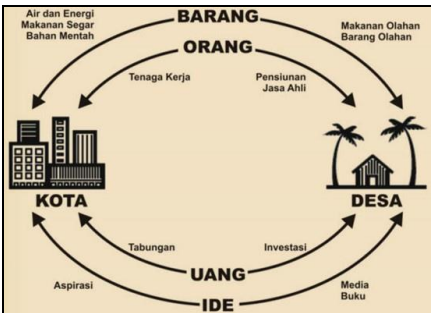
- a. Wilayah Formal (*Uniform Region*) adalah wilayah geografik yang seragam atau homogen menurut kriteria tertentu, dapat berdasarkan :
 - 1) Kondisi geografis, misal topografi, iklim, geologi, morfologi, jenis tanah, vegetasi, kemiringan lereng dan curah hujan
 - 2) Kondisi ekonomi, misal wilayah berikat, mata pencaharian penduduk, pendapatan perkapita yang relatif sama
 - 3) Kondisi sosial, misal bahasa, budaya, sistem sosial masyarakat, agama.

b. Wilayah Fungsional (*Nodal Region*)

Wilayah yang memperlihatkan suatu hubungan fungsional tertentu dan interdependensi antar bagian wilayah.

Wilayah ini terdiri dari bagian-bagian yang heterogen seperti kota dan desa yang secara fisik berbeda tetapi secara fungsional berkaitan. Contoh dari wilayah fungsional adalah :

- 1) Kota berfungsi sebagai pusat kegiatan yang mensuplai kebutuhan sekunder/tersier penduduk desa, sedangkan desa berfungsi sebagai hinterland yang memasok kebutuhan pokok bagi penduduk kota.
- 2) Kawasan hutan mangrove berfungsi sebagai penyangga wilayah pantai dari abrasi.

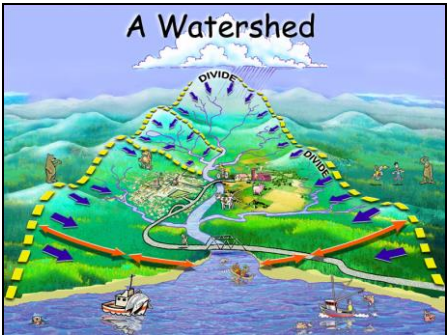


Wilayah fungsional desa dengan kota

c. Wilayah Perencanaan/Pengelolaan Khusus

Wilayah perencanaan tidak dibatasi oleh wilayah administrasi tetapi dibatasi oleh batas-batas alami seperti DAS (Daerah Aliran Sungai).

Wilayah DAS terbentuk sebagai wilayah perencanaan berdasarkan sistem ekologi , sehingga dibutuhkan perencanaan/pengelolaan khusus yang mencakup semua wilayah DAS dari wilayah hulu sebagai kawasan lindung, wilayah tengah sebagai penyangga kawasan lindung dan wilayah hilir sebagai kawasan budidaya.



Wilayah DAS (Daerah Aliran Sungai)

d. Wilayah Administratif

Wilayah administratif adalah daerah otonom yang merupakan wilayah perencanaan yang memiliki landasan yuridis-politis paling kuat. Contoh wilayah administratif adalah desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.

Dalam perencanaannya wilayah administratif memperhatikan aspek sosial, ekonomi, budaya dan ekologi.

e. Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir adalah wilayah interaksi antara daratan dan lautan, yang merupakan agregasi dari berbagai komponen ekologi dan fisik yang saling terkait dan saling mempengaruhi, serta secara ekologis sangat rapuh.

2. Konsep wilayah berdasarkan hierarki

Hirarki suatu wilayah dapat dilihatdari berbagai segi, misalnya dari segi ukuran, bentuk, fungsi atau gabungan dari berbagai unsur tersebut.

Passarge mengemukakan tentang hierarki wilayah dengan urutan :

- a. *Gegend* = merupakan satuan wilayah terkecil
- b. *Landschaftsteil* = gabungan dari beberapa *gegend*
- c. *Landschaft* = gabungan dari beberapa *landschaftsteil*
- d. *Landsteil* = gabungan dari beberapa *landschaft*
- e. *Land* = gabungan dari beberapa *landsteil*

Hierarki wilayah ini sangat berguna untuk perencanaan suatu wilayah. Perencanaan suatu wilayah dapat dimulai dengan:

- 1. Memprioritaskan *gegend* (wilayah terkecil) lebih dahulu kemudian ke wilayah di atasnya, atau
- 2. Dimulai dari wilayah terbesar dulu (*land*) baru kemudian ke wilayah di bawahnya.

Jika mengacu pada wilayah administratif pemerintahan suatu negara maka *gegend* dapat dicontohkan sebagai dusun, *landschaftsteil* sebagai desa, *landschaft* sebagai kecamatan, *landsteil* sebagai kabupaten dan *land* sebagai wilayah propinsi.

B. PEWILAYAHAN (Regionalisasi)

Pewilayahan adalah usaha pembatasan suatu wilayah dengan mengelompokkan aspek-aspek yang sama dan berbeda dalam satu ruang. Regionalisasi suatu wilayah dapat dibagi dengan memperhatikan aspek ekonomi, fisik, budaya, sosial, politik, geografis dan lainnya.

Regionalisasi atau pewilayahan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. **Pewilayahan secara formal (*Uniform Regionalisation*)**

Pembagian wilayah secara formal dapat dilakukan dengan mengelompokkan tempat atas atas objek atau peristiwa tertentu untuk dapat menentukan wilayah-wilayah yang memiliki homogenitas yang sama.

Pewilayahan secara formal ini dapat menggunakan kriteria fisik (topografi, iklim, vegetasi, curah hujan, kondisi geologi dan lain-lain) dan kriteria sosial dan politik (partai politik, tipe industri, tipe pertanian, tingkat pendapatan, tingkat pengangguran, laju pertumbuhan ekonomi dan lain-lain).

Batasan dalam menentukan pewilayahan secara formal :

- Mengklasifikasikan tempat-tempat tertentu berdasarkan tipe obyek yang dikehendaki misalnya membagi wilayah berdasarkan letak lahan, bentuk lahan dan sebagainya.
- Mengelompokkan obyek-obyek yang memiliki tipe yang sama dan membuat batas yang memisahkan setiap zona.

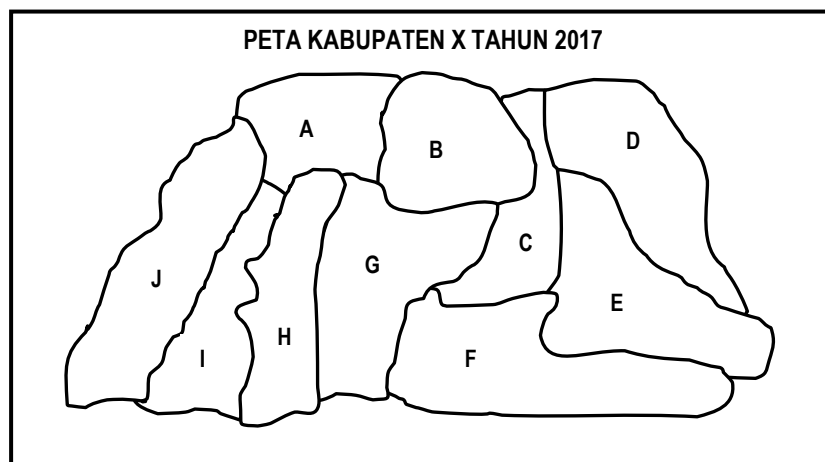
Dalam menentukan batas wilayah formal dapat menggunakan dua metode, yaitu :

- a. Metode Bobot Indeks

Metode ini digunakan untuk memberikan penilaian/pembobotan terhadap dua atau lebih variabel(data) untuk dianalisis. Bobot pada satu variabel kemudian dijumlahkan dengan variabel lainnya agar dapat diketahui homogenitas pada wilayah yang diberi bobot.

Sebagai contoh misalnya pelayan kabupaten X tahun 2017 dilihat dari kondisi sosial ekonomi di semua wilayah pemerintahan di bawahnya (kecamatan). Untuk menentukan homogenitas kondisi sosial ekonomi ini maka variabel yang dibutuhkan adalah pendapatan perkapita (ekonomi) dan variabel tingkat pertumbuhan penduduk (sosial).

Langkah 1 : Persiapkan peta dasar dan variabel sosial dan ekonomi kabupaten X



Data pendapatan perkapita dan tingkat pertumbuhan penduduk per-kecamatan Kabupaten X tahun 2017

| Kecamatan | Pendapatan perkapita (Rp) | Tingkat pertumbuhan penduduk (%) |
|-----------|---------------------------|----------------------------------|
| A | 2.500.000 | 1,3 |
| B | 900.000 | 1,1 |
| C | 850.000 | 1,4 |
| D | 1.250.000 | 1,4 |
| E | 1.800.000 | 1,1 |
| F | 1.650.000 | 0,8 |
| G | 2.250.000 | 1,4 |
| H | 1.400.000 | 1,3 |
| I | 2.150.000 | 0,9 |
| J | 700.000 | 1,3 |

Langkah 2. Buat Bobot Indeks setiap kecamatan di kabupaten X, misalnya dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pendapatan perkapita :
 - a) Pendapatan perkapita \leq Rp. 1.000.000 berbobot 1
 - b) Pendapatan perkapita antara Rp. 1.000.000 – Rp. 1.499.000 berbobot 2
 - c) Pendapatan perkapita antara Rp. 1.500.000 – Rp. 1.999.000 berbobot 3
 - d) Pendapatan perkapita \geq Rp. 2.000.000 berbobot 4
- 2) Tingkat pertumbuhan penduduk :
 - a) Pertumbuhan penduduk $< 1,0\%$ berbobot 4
 - b) Pertumbuhan penduduk antara $1,0\% - 1,1\%$ berbobot 3
 - c) Pertumbuhan penduduk antara $1,2\% - 1,3\%$ berbobot 2
 - d) Pertumbuhan penduduk $\geq 1,4\%$ berbobot 1

Langkah 3. Hitung setiap variabel dan bobot total untuk setiap kecamatan di kabupaten X pada tahun 2017 :

| Kecamatan | Pendapatan perkapita (Rp) | Bobot Pendapatan Perkapita | Tingkat pertumbuhan penduduk (%) | Bobot Tingkat pertumbuhan penduduk | Bobot Total |
|-----------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------|
| A | 2.500.000 | 4 | 1,3 | 2 | 6 |
| B | 900.000 | 1 | 1,1 | 3 | 4 |
| C | 850.000 | 1 | 1,4 | 1 | 2 |
| D | 1.250.000 | 2 | 1,4 | 1 | 3 |
| E | 1.800.000 | 3 | 1,1 | 3 | 6 |
| F | 1.650.000 | 3 | 0,8 | 4 | 7 |
| G | 2.250.000 | 4 | 1,4 | 1 | 5 |
| H | 1.400.000 | 2 | 1,3 | 2 | 4 |
| I | 2.150.000 | 4 | 0,9 | 4 | 8 |
| J | 700.000 | 1 | 1,3 | 2 | 3 |
| | | | | Jumlah | 48 |

Langkah 4. Hitung rata-rata bobot sosial ekonomi kabupaten X tahun 2017 untuk diketahui rata-rata homogenitasnya :
= Jumlah bobot total / jumlah kecamatan
= 48 / 10
= 4,8

Langkah 5. Tentukan jumlah kriteria sosial ekonomi untuk membuat range homogenitasnya :
Misal kriteria yang ditentukan adalah wilayah kecamatan dengan kondisi sosial ekonomi **tinggi**, **sedang**, dan **rendah**.
Berarti penentuan homogenitas sosial ekonomi wilayah kabupaten X dalam **3 kriteria**.

Langkah 6. Buat Range

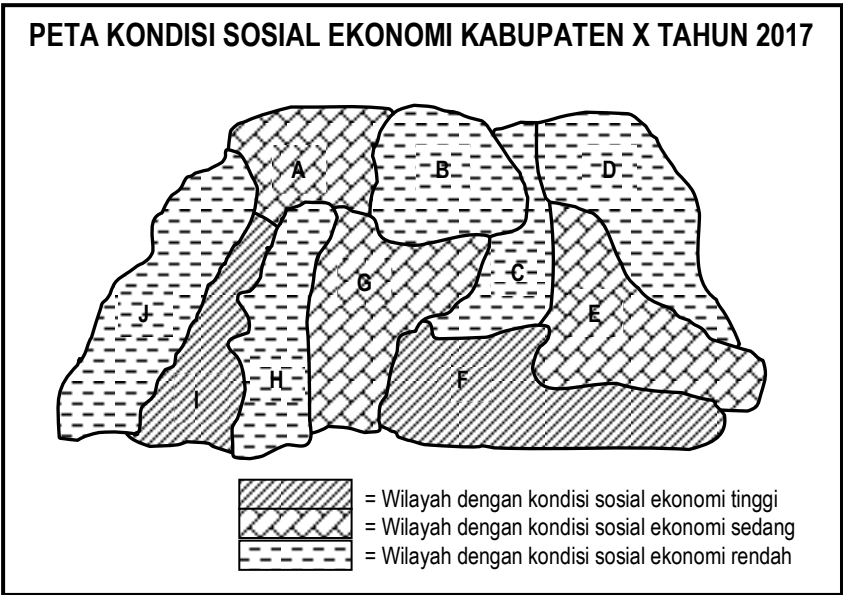
$$\text{RANGE} = \frac{\text{bobot maksimal} - \text{bobot minimal}}{\text{jumlah kriteria yang ditentukan}}$$

Range = (8 – 2)/3
= 6 / 3
= 2 jadi range untuk kelas kriteria sosial ekonomi kabupaten X adalah 2

Langkah 7. Buat range criteria ke tabel, dimulai dari bobot tertinggi dikurangi range, dan selanjutnya dikurangi range lagi sampai terbentuk kelas rangenya.

| No | Kriteria Sosial Ekonomi | Range | Simbol yang digunakan |
|----|--------------------------------------|---------|-----------------------|
| 1 | Wilayah sosial ekonomi tinggi | 6,1 – 8 | |
| 2 | Wilayah sosial ekonomi sedang | 4,1 – 6 | |
| 3 | Wilayah sosial ekonomi rendah | ≤ 4 | |

Langkah 8. Beri tanda simbol pada setiap kecamatan sesuai model simbol yang dipilih, dapat berupa arsir atau warna.



- b. Metode Analisis Faktor
- Merupakan regionalisasi yang rumit dan kompleks, penentuan batas wilayah menggunakan beberapa faktor. Masing-masing faktor terdiri dari beberapa kriteria.

2. **Pewilayahan secara nodal/fungsional (Nodal Regionalisation)**

Perwilayahan fungsional ditentukan dengan adanya hubungan dari titik-titik pertumbuhan pada unit-unit wilayah dengan titik pusat pertumbuhan. Jadi, perwilayahan fungsional lebih menitikberatkan adanya arus hubungan dengan titik pusat. Penentuan perwilayahan fungsional umumnya menggunakan dua metode :

a. Metode analisis arus

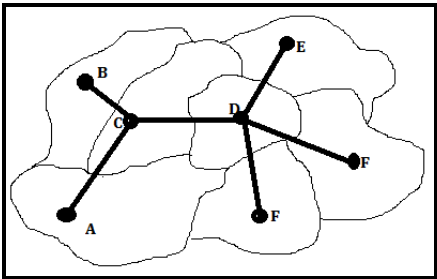
Aktivitas di bidang ekonomi dan transportasi misalnya arus angkutan penumpang dan barang dapat digunakan untuk menentukan pewilayahan secara fungsional. Dalam aktivitas ekonomi, suatu wilayah akan berinteraksi dengan wilayah lainnya menggunakan sarana transportasi, semakin sering melakukan interaksi ke banyak wilayah lain maka secara fungsional wilayah tersebut memberi pengaruh yang lebih besar di banding wilayah yang sedikit berinteraksi dengan wilayah lainnya.

Pendekatan analisis aliran barang/orang dapat dilakukan secara sederhana dengan teori grafik. Contoh analisis aliran barang/orang adalah arus angkutan umum yang melewati jalur transportasi antar wilayah. Jalur angkutan umum yang ada menunjukkan terjadinya hubungan sosial ekonomi antar wilayah.

Berikut ini contoh frekuensi angkutan umum antar wilayah dari satu wilayah ke wilayah lainnya :

| | | Angkutan menuju | | | | | | |
|---------------|---|-----------------|----|----|----|----|----|----|
| | | A | B | C | D | E | F | G |
| Angkutan dari | A | | | 25 | 56 | | | |
| | B | | | 32 | | 38 | | |
| | C | | 27 | | 48 | | | |
| | D | | 35 | | | | 43 | 20 |
| | E | 24 | | 37 | 50 | | 28 | |
| | F | | 30 | | 45 | | | |
| | G | 28 | | 33 | 54 | | | |

Matriks jalur angkutan antar wilayah

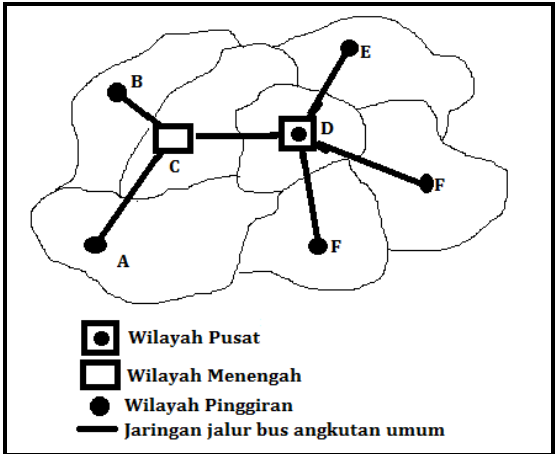


Peta jaringan transportasi antar wilayah ABCDEFG

Dari data di atas diketahui :

1. A memiliki jalur transportasi ke C, D
2. B memiliki jalur transportasi ke C, E
3. C memiliki jalur transportasi ke B, D
4. D memiliki jalur transportasi ke B, F, G
5. E memiliki jalur transportasi ke A, C, D, F
6. F memiliki jalur transportasi ke B, D
7. G memiliki jalur transportasi ke A, C, D

Berdasarkan data analisis arus maka dapat disimpulkan bahwa wilayah D memiliki fungsional yang paling besar dibandingkan wilayah lain jika di lihat dari jumlah trayek angkutan dan besarnya frekuensi angkutan transportasi yang menuju wilayah tersebut sebesar 253 kali angkutan pulang pergi.



Pewilayahan secara fungsional wilayah ABCDEFG

b. Metode analisis gravitasi

Analisi gravitasi digunakan untuk mengetahui kekuatan interaksi antar wilayah, dari hasil perhitungan dapat digunakan untuk menentukan fungsional antar wilayah.

Diasumsikan bahwa interaksi antar dua wilayah memiliki hubungan berbanding lurus dengan massa (penduduk) dan berbanding terbalik dengan jarak

$$I_{ab} = \frac{Pa \cdot Pb}{(D_{ab})^2}$$

Untuk menghitung kekuatan interaksi menggunakan rumus Kekuatan Interaksi dengan memodifikasi rumus gravitasi dari Isaac Newton

Keterangan :
I_{ab} = kekuatan interaksi antara wilayah a dan b
Pa = jumlah penduduk wilayah A
Pb = jumlah penduduk wilayah B
D_{ab} = jarak antara wilayah A - B

3. **Pewilayahan secara geografis (Geographic Regionalisation)**

Penentuan wilayah berdasarkan fenomena geografis dapat dibagi menjadi beberapa bagian :

a. Litosfer

- 1) Berdasarkan struktur geologi
- 2) Berdasarkan pengaruh geologi
- 3) Berdasarkan lempeng tektonik

b. Biosfer

- 1) Berdasarkan flora
- 2) Berdasarkan fauna

c. Hidrosfer

- 1) Berdasarkan ketersediaan air

2) Berdasarkan sumber air

3) Berdasarkan jangkauan terhadap air

d. Antroposfer

- 1) Berdasarkan jumlah dan sebaran penduduk
- 2) Berdasarkan kegiatan industri
- 3) Berdasarkan daerah administrasi

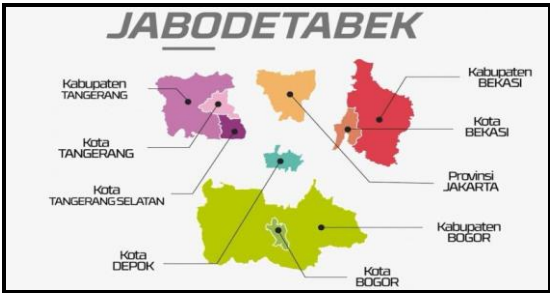
e. Atmosfer

- 1) Berdasarkan iklim dan cuaca
- 2) Berdasarkan suhu dan ketinggian tempat

C. Pusat Pertumbuhan (*Growth Center*)

Pusat pertumbuhan adalah suatu kawasan yang perkembangannya sangat pesat sehingga dapat dijadikan pusat pembangunan bagi berkembangnya wilayah daerah-daerah disekitarnya. Beberapa contoh pusat pertumbuhan misalnya Jakarta – Bogor – Depok – Tangerang – Bekasi (JABOTABEK), pusat Industri Batam, Singapura – Johor – Riau (Segitiga SIJORI), Jogja – Solo – Semarang (JOGLOSEMAR).

- 1. Fungsi pusat pertumbuhan
 - a. memudahkan koordinasi antar wilayah
 - b. melihat perkembangan wilayah
 - c. pemerataan pembangunan wilayah
- 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi
 - a. **Faktor Lokasi**, wilayah dengan lokasi strategis akan berkembang lebih cepat dibanding daerah lainnya. Terdiri 2 unsur :
 - 1) **Areal (*Site*)**, yaitu faktor yang berhubungan dengan kondisi internal suatu wilayah (bentuk wilayah, iklim, tata air, kesuburan tanah dan lain-lain)
 - 2) **Situasi**, yaitu daya jangkau suatu wilayah untuk memberikan pelayanan sosial bagi wilayah lain di sekitarnya.
 - b. **Faktor Sumber daya alam**, suatu wilayah yang memiliki sumber daya alam strategis dan cadangan yang melimpah memiliki potensi untuk berkembang cepat dan menjadi pusat pertumbuhan bagi wilayah-wilayah sekitarnya.
 - c. **Faktor Sumber daya manusia**, suatu wilayah yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi akan lebih cepat berkembang karena program pembangunan bisa direncanakan dengan matang baik dari sisi persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan dan laporan pertanggungjawaban sehingga kegiatan pembangunan berjalan dengan lancar.
 - d. **Faktor Ketersediaan sarana pendukung**, semakin banyak sarana pendukung (jaringan dan jenis transportasi, saran ekonomi, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana lain) di suatu wilayah maka dapat mendukung perekonomian di suatu wilayah sehingga kemajuan wilayah tersebut akan meningkat pesat menjadi pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya.
 - e. **Faktor pengambil kebijakan**, suatu wilayah yang memiliki semua faktor pendukung di atas (lokasi, sumber daya alam, sumber daya manusia, ketersediaan sarana pendukung punya potensi untuk berkembang menjadi pusat pertumbuhan bagi wilayah lainnya. Tetapi faktor kebijakan dari pemerintah juga menjadi factor kunci wilayah tersebut dapat berkembang atau stagnan. Kebijakan seperti rencana tata ruang wilayah, penggunaan lahan, pengendalian pemanfaatan lahan dan berbagai kebijakan lain tentu akan mempengaruhi perkembangan suatu wilayah.



Jabodetabek sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Indonesia

- 3. Teori-teori dasar pusat pertumbuhan
 - a. **Teori tempat yang central atau *Central Place Theory* (Walter Christaller)**

Dasar teori tempat sentral untuk menjawab tiga pertanyaan : besarnya kota, persebaran kota dan banyaknya kota. Konsep pokok pada teori tempat sentral :

- 1) **Range (*Jangkauan*)** jarak yang perlu ditempuh orang untuk mendapatkan barang kebutuhan.
- 2) **Threshold (*ambang*)** jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk kelancaran dan kesinambungan suplai barang.

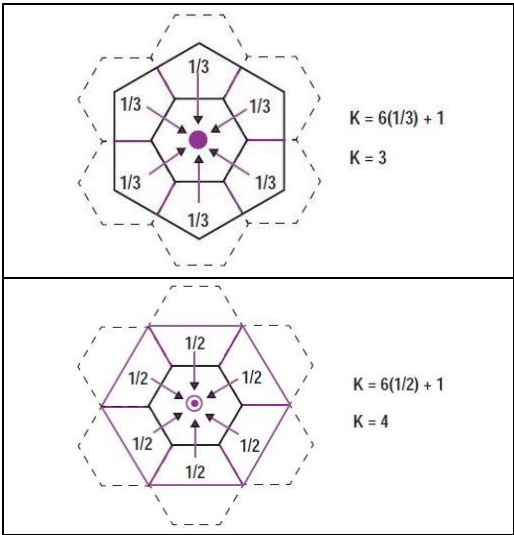
Isi Teori Tempat Sentral menyatakan bahwa suatu lokasi pusat aktifitas yang senantiasa melayani berbagai kebutuhan penduduk harus terletak pada suatu tempat yang sentral.

Syarat utama penerapan *Central Place Theory*

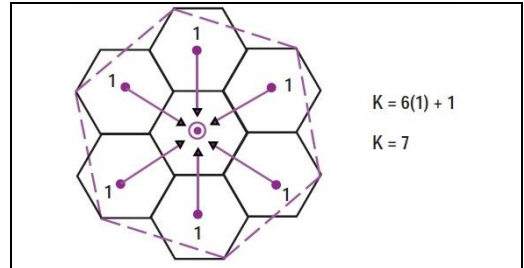
- 1) Topografi/keadaan bentuk wilayah yang relatif seragam
- 2) Kehidupan atau tingkat ekonomi penduduk relatif homogen

Berdasarkan jenis pusat pelayanan hierarkhi tempat yang sentral dapat dibedakan menjadi :

- 1) — Tempat Central yang berhierarkhi 3 ($K=3$)
 - $K=6(1/3)+1=3$
 - Disebut kasus pasar optimal.
 - Pusat pertumbuhan ini mempengaruhi / melayani wilayahnya sendiri dan mempengaruhi / melayani 1/3 bagian dari masing-masing wilayah tetangganya
- 2) — Tempat sentral yang berhierarkhi 4 ($K=4$)
 - $K=6(1/2)+1=4$
 - Disebut situasi lalu lintas yang optimum.
 - Pusat pertumbuhan ini mempengaruhi / melayani wilayahnya sendiri dan mempengaruhi / melayani 1/2 bagian dari masing-masing wilayah tetangganya



- 3) — Tempat sentral hierarki 7 ($K=7$) 6
- $K=6(1)+1$
 - Disebut situasi administrasi yang optimum.
 - Pusat pertumbuhan ini mempengaruhi / melayani wilayahnya sendiri dan mempengaruhi / melayani seluruh bagian dari masing-masing wilayah tetangga



b. **Teori Kutub pertumbuhan (Growth Poles Theory) oleh Perroux**

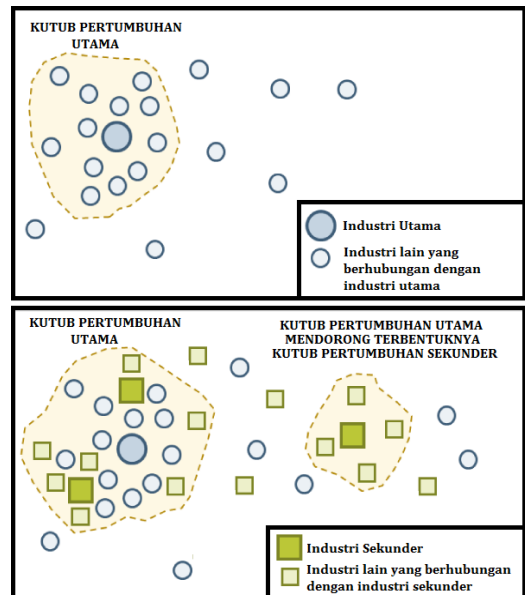
Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di setiap daerah tidak terjadi di sembarang tempat tetapi di lokasi tertentu yang disebut kutub pertumbuhan. Untuk mencapai tingkat pendapatan tinggi harus dibangun beberapa tempat pusat kegiatan ekonomi yang disebut dengan growth pole (kutub pertumbuhan). Pandangan Perroux mengenai proses pertumbuhan adalah teori tata ruang ekonomi, dimana industri pendorong memiliki peranan awal dalam membangun sebuah pusat pertumbuhan.

Industri pendorong ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Merupakan wilayah dengan konsentrasi penduduk tinggi
- 2) Memiliki teknologi tinggi dan maju
- 3) Mendorong perkembangan industri di sekitarnya
- 4) Manajemen yang profesional dan modern
- 5) Sarana dan prasarana yang sudah lengkap

Konsep Kutub Pertumbuhan ini dapat didefinisikan secara :

- 1) **Secara geografis**, kutub pertumbuhan dapat digambarkan sebagai suatu lokasi yang memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menimbulkan daya tarik bagi berbagai kalangan untuk mendirikan berbagai macam usaha di daerah tersebut dan masyarakat senang memanfaatkan fasilitas tersebut.
- 2) **Secara fungsional**, kutub pertumbuhan dapat diartikan sebagai suatu lokasi konsentrasi kelompok ekonomi (industri, bisnis dll) yang mengakibatkan pengaruh ekonomi ke dalam maupun keluar wilayah tersebut.



Kutub pertumbuhan menurut Perroux

c. **Teori Polarisasi ekonomi (Polarization of Economic Growth) oleh Gunnar Myrdal**

Menurut Myrdal, setiap daerah mempunyai pusat pertumbuhan yang menjadi daya tarik bagi beberapa faktor berikut :

- 1) tenaga buruh dari pinggiran
- 2) tenaga terampil
- 3) investor/penanam modal
- 4) barang-barang dagangan yang menunjang pertumbuhan suatu lokasi.

Daya tarik suatu pusat pertumbuhan akan menyebabkan keempat faktor di atas berdatangan terus-menerus sehingga pusat pertumbuhan tersebut makin lama makin pesat atau akan terjadi polarisasi pertumbuhan ekonomi.

Teori ini menggunakan konsep pusat-pinggiran. Konsep ini merugikan daerah pinggiran, sehingga perlu diatasi dengan :

- 1) membatasi migrasi (urbanisasi)
- 2) mencegah keluarnya modal dari daerah pinggiran
- 3) membangun daerah pinggiran
- 4) membangun wilayah pedesaan.

Adanya pusat pertumbuhan akan berpengaruh terhadap daerah di sekitarnya. Pengaruh tersebut dapat berupa :

- 1) Pengaruh positif terhadap perkembangan daerah sekitarnya disebut **spread effect**, contohnya :
 - a) terbukanya kesempatan kerja
 - b) banyaknya investasi yang masuk
 - c) upah buruh semakin tinggi
 - d) penduduk dapat memasarkan bahan mentah.
- 2) Pengaruh negatifnya disebut **backwash effect**, contohnya :
 - a) adanya ketimpangan wilayah
 - b) bertambahnya pengangguran
 - c) meningkatnya kriminalitas
 - d) kerusakan lingkungan dan lain sebagainya.



Pusat pertumbuhan menjadi daya tarik bagi penduduk daerah pinggiran baik tenaga buruh maupun tenaga terampil



Spread Effect Polarisasi ekonomi membuat upah buruh tinggi

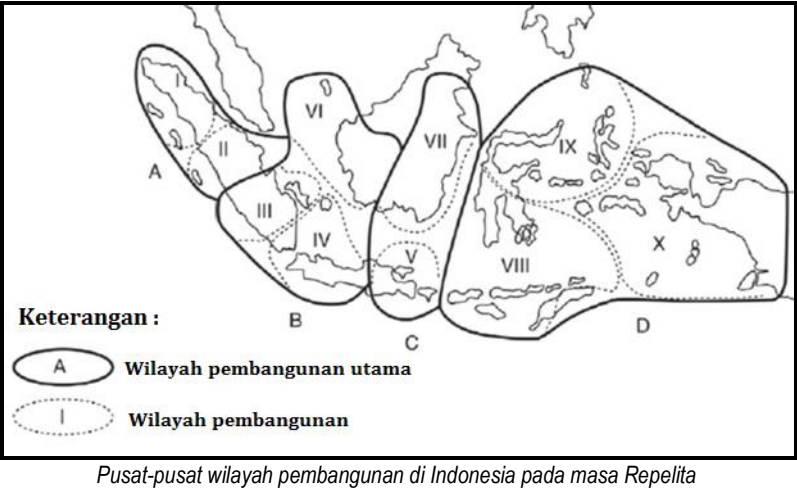


Backwash Effect Polarisasi ekonomi menyebabkan kerusakan lingkungan

D. Pusat Pertumbuhan di Indonesia

Pola perencanaan pembangunan di Indonesia menggunakan *pendekatan regional* menyelaraskan antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional (daerah). Menurut BAPPENAS wilayah Indonesia dibagi menjadi 4 Wilayah Pembangunan Utama (WPU), mencakup 10 wilayah pembangunan (WP) :

Wilayah Indonesia yang luas dan terdiri atas banyak pulau berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan pembangunan. Pembangunan nasional akan lancar apabila pelaksanaannya tidak terpusat dalam satu wilayah, misalnya Jawa, tetapi menyebar dan menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia. Atas dasar ini, maka pembangunan nasional Indonesia dilaksanakan dengan sistem pewilayahan (regionalisasi) dan kota-kota utama yang ada dijadikan sebagai pusat-pusat pertumbuhannya.



Pusat-pusat wilayah pembangunan di Indonesia pada masa Repelita

Berikut ini rincian dari wilayah-wilayah pembangunan di Indonesia pada masa Repelita:

| No | Region | Pusat Pertumbuhan (Kota Utama) | Wilayah | Propinsi / Daerah |
|----|--------|--------------------------------|---------|---|
| 1 | A | MEDAN | I | Aceh dan Sumatra Utara berpusat di Medan |
| | | | II | Sumatra Barat, Riau dan Kepulauan Riau, berpusat di Pekanbaru |
| 2 | B | JAKARTA | III | Jambi, Sumsel, Bengkulu, dan Bangka Belitung, berpusat di Palembang . |
| | | | IV | Lampung, Banten, Jabar, Jakarta, Jateng dan DIY, berpusat di Jakarta |
| | | | V | Kalimantan Barat, berpusat di Pontianak |
| 3 | C | SURABAYA | VI | Jawa Timur, berpusat di Surabaya |
| | | | VII | Kalteng, Kaltim, dan Kalsel, berpusat di Balikpapan dan Samarinda |
| 4 | D | MAKASSAR | VIII | NTT, NTB, Sulsel dan Sultra, berpusat di Makassar |
| | | | IX | Sulteng, Sulut dan Gorontalo, berpusat di Manado |
| | | | X | Maluku, Maluku Utara dan Irian Jaya (Papua), berpusat di Sorong |

E. Pengaruh Pusat Pertumbuhan

1. **Pemusatan Sumber Daya Manusia**
Munculnya pusat pertumbuhan di suatu wilayah akan menarik tenaga kerja yang banyak. Para pekerja dari luar wilayah akan pindah dan menetap di wilayah pusat pertumbuhan sehingga terjadi pemusatan penduduk atau sumber daya manusia. Arus migrasi penduduk dari daerah pedesaan menuju pusat pertumbuhan atau kota di Indonesia menunjukkan peningkatan seiring dengan perkembangan pusat pertumbuhan atau kota itu.
2. **Perkembangan Ekonomi**

a Industri berkembang pesat

b Berkembangnya pusat-pusat pertokoan

c Terciptanya lapangan kerja baru

d Pendapatan masyarakat meningkat

e Munculnya lembaga perbankan

f Berkembangnya badan usaha swasta maupun pemerintah
3. **Dinamika Sosial Masyarakat**

a Terbukanya wawasan masyarakat

b Perubahan jenis mata pencaharian

c Informasi lebih terbuka

d Pendapatan masyarakat bervariasi

e Timbulnya kelompok masyarakat tertentu

f Percampuran budaya (akulturasi)



Pusat pertumbuhan menyebabkan pemusatan SDM dan arus migrasi yang tinggi (urbanisasi)



Pusat pertumbuhan berpengaruh pada berkembangnya pusat-pusat pertokoan yang pesat



Pusat pertumbuhan berpengaruh pada kemudahan mendapatkan informasi dan terbukanya wawasan masyarakat

F. Perencanaan Wilayah

Perencanaan wilayah adalah perencanaan penggunaan ruang wilayah dan perencanaan aktivitas pada ruang wilayah. Perencanaan ruang wilayah oleh pemerintah dituangkan dalam perencanaan tata ruang wilayah, sedangkan perencanaan aktivitas dituangkan dalam rencana pembangunan wilayah.

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah melakukan perencanaan penataan wilayah :

- 1. Potensi setiap wilayah yang berbeda, baik pada SDA maupun SDM
- 2. Perkembangan teknologi yang sangat cepat sehingga mempengaruhi perubahan dalam kehidupan manusia.
- 3. Adanya kesalahan perencanaan di masa lalu sehingga tidak dapat diubah/diperbaiki kembali.
- 4. Kebutuhan lahan yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk yang cepat.
- 5. Perlunya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum.
- 6. Kegiatan manusia yang berdampak buruk bagi manusia
- 7. Sumber Daya Alam yang semakin berkurang karena manusia tidak menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan.



Maket Perencanaan Wilayah pada suatu kota

Atas dasar pertimbangan tersebut maka pemerintah berhak mengatur dan merencanakan tata ruang wilayah dalam skala nasional, propinsi dan kabupaten/kota. Pembangunan suatu wilayah yang sesuai dengan **RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)** dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat

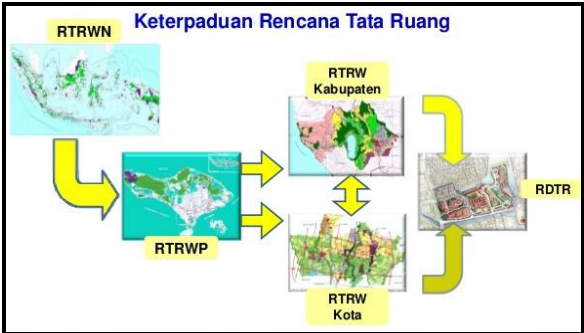
Tujuan dari perencanaan wilayah adalah untuk menciptakan suatu kehidupan yang aman, nyaman, efisien dan lestari sehingga diharapkan kesejahteraan manusia dapat lebih terwujud

Berdasarkan Undang-Undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa penataan ruang wilayah yang dilakukan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota harus mencakup aspek tujuan pemanfaatan ruang, struktur ruang, pola ruang dan pola pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

RTRW Nasional merupakan arahan kebijakan dan strategi dalam pemanfaatan ruang wilayah negara. Muatan RTRW Nasional antara lain :

- a. Tujuan,kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional.
- b. Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional, meliputi perencanaan sistem wilayah pelayanan dan jaringan prasarana wilayah yang mengintegrasikan wilayah nasional, seperti sistem perkotaan nasional, transportasi nasional, telekomunikasi nasional dan sumber daya air.
- c. Rencana Pola Ruang Wilayah Nasional, merupakan rencana distribusi peruntukan ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasional dan kawasan budidaya yang bernilai strategis nasional
- d. Penetapan Kawasan Strategis Nasional, merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan.
- e. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional untuk jangka pendek dan menengah.
- f. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional



Rencana berjenjang RTRW Nasional – RTRW Propinsi – RTRW Kabupaten/Kota - RDTR

2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

RTRW Propinsi adalah rencana kebijakan operasional dari RTRW Nasional yang berisi strategi pengembangan wilayah propinsi. Muatan RTRW Propinsi antara lain :

- a. Sebagai pedoman, arahan dan strategi penataan ruang wilayah propinsi.
- b. Rencana struktur ruang wilayah propinsi, meliputi kawasan perkotaan, pedesaan dan kawasan tertentu.
- c. Rencana pola ruang wilayah yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- d. Penetapan kawasan strategis, misalnya kawasan stategis budaya karena wilayah tersebut ada peninggalan budaya.
- e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah propinsi untuk jangka pendek dan menengah
- f. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah propinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sosial.

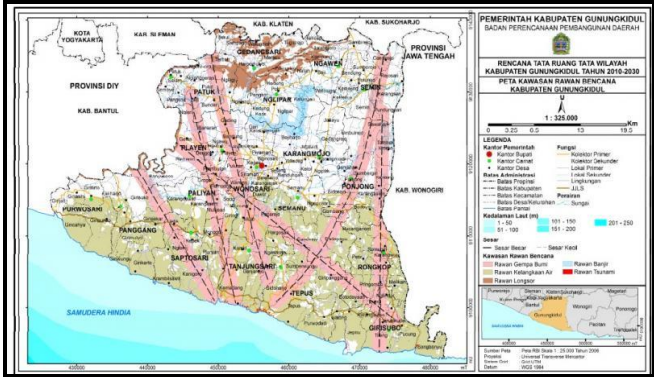


Penetapan Kawasan Strategis di Propinsi DIY dengan

3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota

RTRW Kabupaten/Kota merupakan penjabaran dari RTRW Propinsi yang disertai dengan strategi pengelolaan kawasan tersebut. Muatan RTRW Kabupaten/Kota antara lain :

- a. Sebagai tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
- b. Pedoman rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang meliputi kawasan perkotaan, pedesaan dan kawasan lainnya.
- c. Rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- d. Penetapan kawasan strategis kabupaten/kota, misalnya kawasan strategis ekonomi sebagai pusat perkonomanian dan perdagangan
- e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota yang terdiri dari program jangka pendek dan menengah.
- f. Pengendalian pemanfaatan ruang.



Peta Rencana Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul 2010 - 2030

G. Pembangunan Wilayah Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang. Salah satu faktor yang menyebabkan suatu wilayah menjadi pusat pertumbuhan bagi wilayah lainnya adalah kemajuan pesat di bidang pembangunan. Pusat pertumbuhan tersebut akan selalu melaksanakan program pembangunan untuk memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri maupun wilayah lain di sekitarnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan para pengembang dalam membangun pusat pertumbuhan adalah prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada sosial ekonomi, sosial dan lingkungan. Prinsip-prinsip ini tentunya adalah untuk pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa melupakan generasi mendatang.

Pembangunan suatu wilayah perlu menerapkan konsep berkelanjutan yang didasari oleh lima hal berikut ini :

- 1. **Proses pembangunan berlangsung terus-menerus.** Pembangunan fisik, sosial maupun ekonomi terus-menerus dilakukan karena kebutuhan manusia yang terus meningkat. Pembangunan berkelanjutan diperlukan agar kebutuhan masa kini dan masa depan tetap dapat terpenuhi.
- 2. **Sumber Daya Alam memiliki ambang batas.** Semakin tinggi intensitas penggunaan sumber daya alam dapat menurunkan kualitas dan kuantitas lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam baik yang dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui harus di bawah atau setara batas yang telah ditentukan agar tujuan penting dari pembangunan berkelanjutan tetap dapat dilaksanakan.
- 3. **Kualitas Lingkungan berkorelasi dengan kualitas hidup.** Pengelolaan lingkungan akan menentukan kualitas/mutu lingkungan. Kualitas lingkungan di suatu wilayah dapat menunjukkan perilaku masyarakat setempat dalam memperlakukan dan mengelola lingkungan. Lingkungan berkualitas dicirikan dengan masyarakatnya merasa nyaman, betah, kebutuhan terpenuhi dan sadar lingkungan.
- 4. **Memungkinkan pemilihan sumber daya alternatif.** Pemanfaatan secara berlebihan akan mengancam ketersediaan sumber daya alam terutama yang tidak dapat diperbarui. Adanya sumber daya alternatif dapat mempertahankan daya dukung lingkungan sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dijalankan.
- 5. **Pembangunan berkelanjutan mengandalkan solidaritas transgenerasi.** Pembangunan berkelanjutan bertujuan pada terpuhinya generasi pada masa kini maupun pada masa mendatang, untuk itu peran lintas generasi diperlukan agar tujuan tersebut dapat tercapai. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menanamkan pentingnya pembangunan kepada generasi berikutnya, bisa melewati pendidikan atau bidang lain.



Proses pembangunan harus berwawasan lingkungan agar tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.



Sumber energi alternatif perlu dikembangkan untuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

H. Soal Pilihan Ganda

1. Berikut ini wilayah formal yang bersifat sosial secara geografis adalah
a. pendapatan, mata pencaharian, dan pendidikan
b. bahasa, sosial budaya, dan tata cara pergaulan
c. iklim, jenis tanah, dan morfologi permukaan bumi
d. pendapatan, curah hujan, dan tata cara pergaulan
e. bahasa, kemiringan lereng, dan mata pencaharian

2. Kawasan hutan mangrove merupakan kawasan penyangga wilayah pantai dari ancaman abrasi oleh air laut, kawasan ini merupakan contoh dari wilayah
a. wilayah formal
b. wilayah fungsional
c. wilayah pesisir
d. wilayah perencanaan
e. wilayah pengelolaan khusus

3. Daerah aliran sungai Citarum, daerah aliran sungai Brantas adalah contoh wilayah ...
a. wilayah formal
b. wilayah fungsional
c. wilayah administratif
d. wilayah perencanaan
e. wilayah pesisir

4. Konsep wilayah secara hierarki dari urutan yang terkecil adalah
a. *gegend-land-landschaft-landsteil-landschaftsteil*
b. *gegend-land-landsteil-landschaft-landschaftsteil*
c. *gegend-landschaftsteil-land- landschaft-landsteil*
d. *gegend-landschaftsteil-landsteil-landschaft-land*
e. *gegend-landschaftsteil-landschaft-landsteil-land*

5. Gabungan data dari beberapa variabel memiliki bobot tertinggi 15, sedangkan bobot terendahnya adalah 3. Jika gabungan variabel tersebut akan dibuat dalam 4 kriteria, maka range dalam setiap kriteria tersebut adalah ...
a. 3
b. 4
c. 5
d. 6
e. 7

6. Penentuan wilayah secara geografis berdasarkan ketersediaan air tanah memperhatikan faktor ...
a. hidrologi
b. geologis
c. antroposfer
d. atmosfer
e. lithosfer
7. Jika menentukan perwilayahan secara fungsional menggunakan metode analisis arus transportasi dan arus barang, maka wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan tersebut ...
a. dilewati oleh jalur bus dari semua wilayah di sekitarnya dan dengan frekuensi angkutan penumpang dan barang yang sama dengan wilayah sekitarnya.
b. dilewati oleh jalur bus dari semua wilayah di sekitarnya dan dengan frekuensi angkutan penumpang dan barang yang sama dengan wilayah sekitarnya.
c. tidak dilewati oleh jalur bus dari semua wilayah di sekitarnya dan dengan frekuensi angkutan penumpang dan barang yang paling rendah dari wilayah sekitarnya.
d. dilewati oleh jalur bus dari semua wilayah di sekitarnya dan dengan frekuensi angkutan penumpang dan barang yang paling rendah dari wilayah sekitarnya.
e. dilewati oleh jalur bus dari semua wilayah di sekitarnya dan dengan frekuensi angkutan penumpang dan barang yang paling tinggi dari wilayah sekitarnya.

8. Suatu wilayah pusat pertumbuhan memiliki hirarki 4 jika mempengaruhi wilayahnya sendiri dan
a. $\frac{1}{4}$ wilayah tetangganya
b. $\frac{1}{3}$ wilayah tetangganya
c. $\frac{1}{2}$ wilayah tetangganya
d. $\frac{3}{4}$ wilayah tetangganya
e. seluruh wilayah tetangganya

9. Contoh dampak positif (*spread effect*) pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya adalah ...
a. bertambahnya pengangguran
b. masuknya modal dari investor
c. meningkatnya kriminalitas
d. kerusakan lingkungan
e. ketimpangan antarwilayah

10. Pusat pembangunan wilayah pembangunan region D adalah kota
a. Jakarta
b. Medan
c. Pontianak
d. Makassar
e. Surabaya

I. Soal Uraian

1. Jelaskan perbedaan pokok antara wilayah formal dengan wilayah fungsional!
2. Jelaskan konsep pokok teori tempat sentral dan syarat utama penerapan teori tersebut!
3. Jelaskan batasan dalam menentukan perwilayahan secara formal!
4. Jelaskan 5 (lima) faktor yang mempengaruhi pusat pertumbuhan suatu wilayah!
5. Jelaskan 5 (lima) faktor yang dapat menjadi pendorong wilayah di sekitarnya dapat ikut berkembang!
6. Jelaskan dampak positif pusat pertumbuhan menurut Gunar Myrdal!
7. Jelaskan dampak negatif pusat pertumbuhan menurut Gunar Myrdal!
8. Jelaskan faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah melakukan perencanaan penataan wilayah
9. Jelaskan tujuan dari perencanaan penataan suatu wilayah!
10. Jelaskan 5 (lima) faktor yang mendasari perlunya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di suatu wilayah

J. Soal Wordsearch Puzzle

Carilah 11 kota di Indonesia yang menjadi pusat wilayah-wilayah pembangunan di Indonesia.

B A N D U N G B A L I K P A P A N M S A M P I T A M
O S M A N E O D P O M U A U L N A A J N U I S A M A
G R I E A G R S O L O A L B A A T C O A R D A S B N
O T N A D R O I R M N L E M Y M R A E W K N M I O O
R S A U R A N S A I P O M A E A A M I H A A A K N K
P O N T I A N A K M A U B T N W K A T A M A R I N W
U L G M A L T A R A U A A A T R A K A R U S I T R A
R O K A R T A L I M R I N J O G J A P T B A N J A R
W K A T M A L A R U A N G O W A G S L A T S D I N I
O R B A A M O U S J E M B E R P O S O P A D A N G K
R I O T N A N W I U A R O T O A J A W R G A R A G E
E P E K A N B A R U T M M I G L P R A L O K K K U P
J O N E D I N T A I L A B N O U O R L A U N D R P E
O N G L O K L O P A P U A I B A N T E N N A G R E K

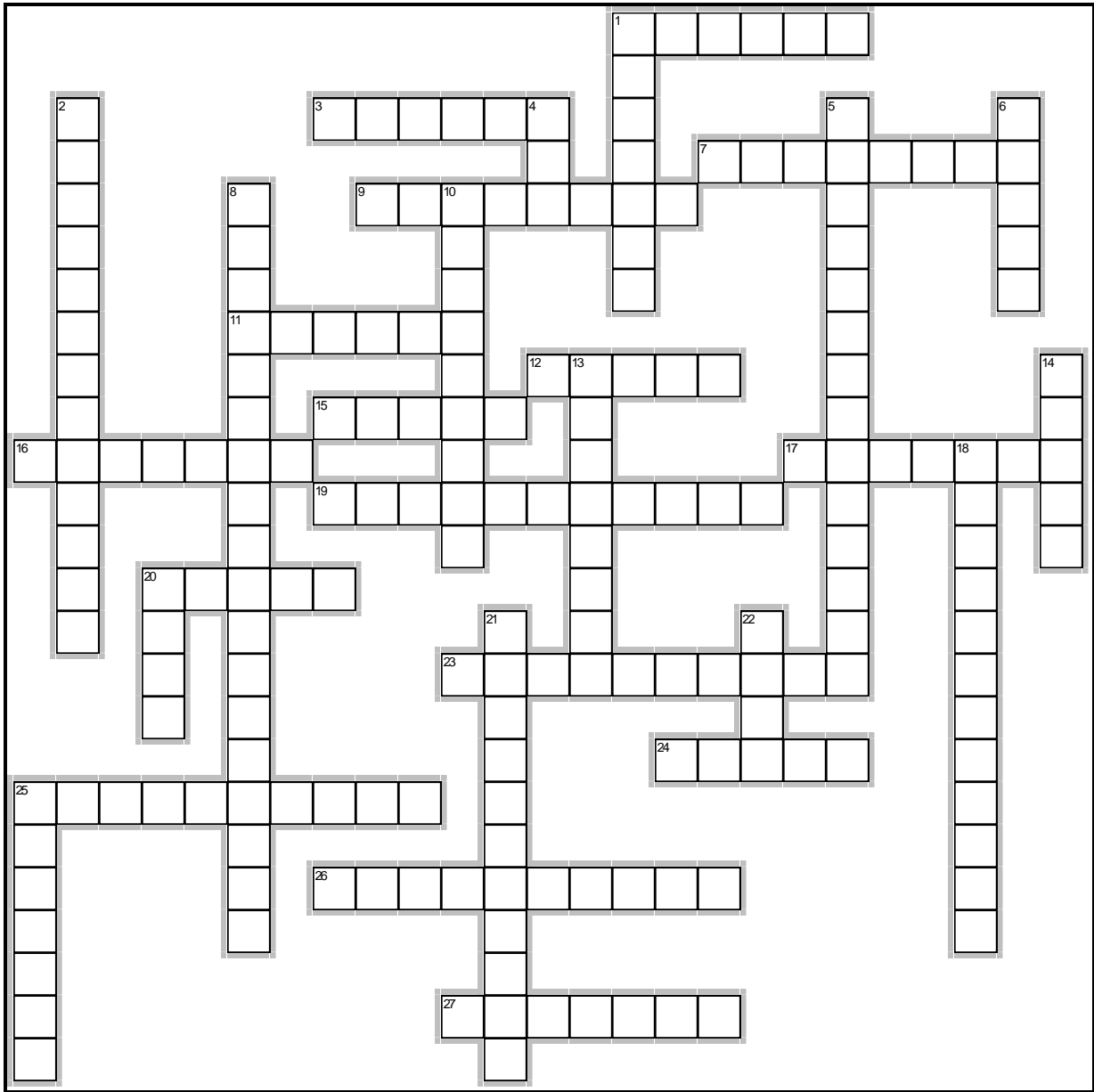
K. Soal Scramble

Jodohkanlah soal yang terdapat di kolom soal dengan jawaban benar pada kolom jawaban di sampingnya!

| SOAL | JAWABAN |
|--|---------------------------|
| 1. Wilayah geografik yang seragam/ homogen menurut kriteria tertentu () | a. Administrasi optimum |
| 2. Contoh kriteria wilayah seragam menurut kondisi geografis () | b. Areal |
| 3. Contoh kriteria wilayah seragam menurut kondisi ekonomi () | c. Bahasa |
| 4. Contoh kriteria wilayah seragam menurut kondisi sosial () | d. DAS |
| 5. Wilayah yang terdiri dari bagian-bagian heterogen seperti desa dan kota () | e. Gegend |
| 6. Contoh wilayah dengan perencanaan/pengelolaan khusus () | f. Gunar Myrdal |
| 7. Contoh wilayah berdasarkan administrasi () | g. Jabodetabek |
| 8. Hierarki satuan wilayah terkecil menurut Passarge () | h. Jakarta |
| 9. Jakarta – Bogor – Depok – Tangerang – Bekasi () | i. Joglosemar |
| 10. Singapura – Johor – Riau () | j. Kabupaten |
| 11. Jogja – Solo – Semarang () | k. Kriminalitas meningkat |
| 12. Faktor lokasi yang berhubungan dengan kondisi internal suatu wilayah () | l. Lalulintas optimal |
| 13. Faktor lokasi yang berhubungan dengan daya jangkau suatu wilayah () | m. Makassar |
| 14. Tokoh yang menyampaikan teori tempat sentral () | n. Mata pencaharian |
| 15. Tempat sentral berhierarki 3 () | o. Medan |
| 16. Tempat sentral berhierarki 4 () | p. Morfologi |
| 17. Tempat sentral berhierarki 7 () | q. Pasar optimum |
| 18. Tokoh yang menyampaikan teori kutub pertumbuhan () | r. Perroux |
| 19. Tokoh yang menyampaikan teori polarisasi ekonomi () | s. Sijori |
| 20. Contoh spread effect menurut teori polarisasi ekonomi () | t. Situasi |
| 21. Contoh backwash effect menurut teori polarisasi ekonomi () | u. Surabaya |
| 22. Pusat pertumbuhan wilayah A di Indonesia () | v. Upah gaji tinggi |
| 23. Pusat pertumbuhan wilayah B di Indonesia () | w. Walter Christaller |
| 24. Pusat pertumbuhan wilayah C di Indonesia () | x. Wilayah formal |
| 25. Pusat pertumbuhan wilayah D di Indonesia () | y. Wilayah fungsional |

L. Soal Teka – Teki Silang

TEKA-TEKI SILANG WILAYAH PEWILAYAHAN



| Mendatar | Menurun |
|--|---|
| 1. Singapura Johor dan Riau | 1. Daya jangkau suatu wilayah untuk memberi pelayanan sosial bagi wilayah lain di sekitarnya. |
| 3. Satuan wilayah terkecil dalam konsep wilayah secara hierarki. | 2. Wilayah geografik yang homogen menurut kriteria tertentu |
| 7. Kota Utama pusat pertumbuhan region C pada masa Repelita. | 4. Contoh wilayah perencanaan/pengelolaan khusus. |
| 9. Kota Utama pusat pertumbuhan region D pada masa Repelita. | 5. Pengaruh negatif pusat pertumbuhan menurut Gunnar Myrdal. |
| 11. Contoh wilayah formal berdasarkan kriteria kondisi sosial | 6. Konsep teori tempat sentral yang berkaitan dengan keterjangkauan wilayah. |
| 12. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | 8. Gresik Bangkalan Mojokerto Surabaya Sidoarjo Lamongan |
| 15. Faktor yang berkaitan dengan kondisi internal suatu wilayah. | 10. Contoh dari wilayah administratif |
| 16. Contoh wilayah formal berdasarkan kriteria kondisi geografis | 13. Konsep teori tempat sentral yang berkaitan dengan ambang batas jumlah penduduk minimal untuk kelangsungan barang. |
| 17. Wilayah interaksi antara daratan dengan lautan. | 14. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi |
| 19. Wilayah yang memperlihatkan hubungan fungsional tertentu dan interdependensi antar wilayah | 18. Pengaruh positif pusat pertumbuhan menurut Gunnar Myrdal. |
| 20. Rencana Tata Ruang Wllayah Kabupaten/Kota | 20. Rencana Detail Tata Ruang |
| 23. Gabungan dari beberapa Landschaftsteil. | 21. Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi |
| 24. Kota Utama pusat pertumbuhan region A pada masa Repelita. | 22. Gabung dari beberapa landsteil. |
| 25. Jogja Solo Semarang | 25. Kota Utama pusat pertumbuhan region B pada masa Repelita. |
| 26. Pengaruh pusat pertumbuhan terhadap dinamika sosial masyarakat | |
| 27. Pencetus teori pusat pertumbuhan. | |

M. Refleksi

Setelah mempelajari materi bab Wilayah dan Pewilayahan Dalam Pembangunan Nasional ini, maka tingkat pemahaman saya terhadap materi bab tersebut adalah sebagai berikut :

| No | Materi | Tidak menguasai | Kurang menguasai | Menguasai | Sangat menguasai |
|----|--|-----------------|------------------|-----------|------------------|
| 1 | Menjelaskan konsep-konsep wilayah secara umum dan konsep wilayah secara hierarkis | | | | |
| 2 | Menentukan pewilayahan suatu daerah baik secara formal maupun secara fungsional | | | | |
| 3 | Menjelaskan faktor pusat pertumbuhan dan teori-teori tentang pusat pertumbuhan dari berbagai tokoh | | | | |
| 4 | Mendeskrripsikan daerah yang menjadi pusat pertumbuhan di suatu wilayah | | | | |
| 5 | Menjelaskan pengaruh pusat pertumbuhan pada berbagai bidang | | | | |
| 6 | Menjelaskan tahap perencanaan wilayah secara bertahap baik nasional, propinsi, kabupaten dan kecamatan | | | | |
| 7 | Dapat menjelaskan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan | | | | |

DAFTAR PUSTAKA

- Aribowo, Yoga. 2007. Geografi Untuk SMA Kelas XII. Jakarta:Ganeca Exact
- Arifin, Aji. 2016. Geografi Peminatan Ilmu-ilmu Sosial Untuk SMA/MA Kelas XII. Surakarta:Mediatama
- Harmanto, Gatot dan Firman, Jaka. 2015. Geografi Untuk SMA/MA Kelas XII Kelompok Peminatan Ilmu-ilmu Sosial. Bandung:Yrama Widya
- Setiawan, Agnas. 2018. Membuka Wawasan Dengan Geografi Untuk Kelas XII SMA/MA. Yogyakarta:Deepublish.
- Yulir, Yulmaida. 2007. Geografi Untuk SMA Kelas XII. Yogyakarta:Yudhistira

Situs Rujukan :

<https://kelasips.com/wilayah-dan-perwilayahan/>

<http://www.sselajar.net/2012/12/perwilayahan-formal-dan-fungsional-2.html>

<https://duniainformasisemasa360.blogspot.com/2012/12/perwilayahan-formal-dan-fungsional-2.html>